

# STATISTIK PENDIDIKAN

*Provinsi Sulawesi Selatan*

**2021**



# STATISTIK PENDIDIKAN

*Provinsi Sulawesi Selatan*

**2021**



BADAN PUSAT STATISIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

# STATISTIK PENDIDIKAN

## PROVINSI SULAWESI SELATAN 2021

**ISBN:**

**No. Publikasi:** 73000.2221

**Katalog:** 4301002.73

**Ukuran Buku:** 14,8 cm x 21 cm

**Jumlah Halaman:** x + 62 halaman

**Naskah:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**

**Penyunting:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**

**Desain Kover:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**

**Diterbitkan oleh:**

© **Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**

**Dicetak oleh:**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**

**Sumber Ilustrasi:**

**Freepik – Freepik.com**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

## Tim Penyusun

### Penanggung Jawab Umum

Suntono, SE, M.Si

### Penanggung Jawab Teknis/Editor

Yan Hirmawan, SST

### Anggota

Ika Musvita Baso, SST.

Khadija Abduh, SST

<https://sulsel.bps.go.id>



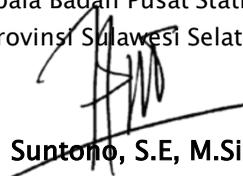
## Kata Pengantar

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Makassar, April 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan



**Suntono, S.E, M.Si**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	x
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Sumber Data.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. Metodologi.....</b>	<b>7</b>
2.1. Ruang Lingkup.....	7
2.2. Kerangka Sampel .....	8
2.3. Rancangan Sampel .....	8
2.4. Metode Pengumpulan Data .....	9
2.5. Pengolahan Data.....	10
<b>BAB III. Konsep dan Definisi .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV. Partisipasi Sekolah .....</b>	<b>17</b>
4.1. Angka Partisipasi Sekolah .....	17
4.1.1. Partisipasi Siswa pada PAUD.....	17
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP, dan SMA...	21
4.2. Angka Partisipasi Kasar.....	2

4.3. Angka Partisipasi Murni .....	30
<b>BAB V. Capaian Pendidikan .....</b>	<b>37</b>
5.1. Buta Huruf.....	37
5.2. Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi.....	46
5.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	49
<b>BAB VI. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....</b>	<b>53</b>
6.1. Jumlah Sekolah .....	53
6.2. Jumlah Guru .....	56
6.3. Jumlah Murid .....	59
6.4. Rasio Murid terhadap Rombongan Belajar dan Guru .....	63
<b>BAB V. Penutup.....</b>	<b>67</b>
7.1. Kesimpulan.....	67

## Daftar Tabel

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 5–6 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021.....	19
Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 0–6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021 .....	20
Tabel 3. Angka Partispasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021.....	23
Tabel 4. Angka Partispasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021.	27
Tabel 5. Angka Partispasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021.....	32
Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021.....	41
Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	45

Tabel 8.	Persentase Penduduk Usia 7–18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	47
Tabel 9.	Persentase Penduduk Usia 7–18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Klasifikasi Daerah, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	48
Tabel 10.	Jumlah Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 .....	54
Tabel 11.	Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 .....	57
Tabel 12.	Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 .....	60
Tabel 13.	Jumlah dan Rasio Murid dan Rombongan Belajar menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 .....	63
Tabel 14.	Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 .....	64

## Daftar Gambar

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7– 18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	21
Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021.....	40
Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	43
Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021 .....	50

k

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin, 1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Di samping sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antarpenduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kultur sosial dan budaya yang berbeda antardaerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun bagi penduduk perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di

bidang pendidikan. Pembangunan di bidang

pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dengan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Sulawesi Selatan bersaing dalam tataran global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi "*Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2021*" sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Selain itu, digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi kasar (APK), serta tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia prasekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dan penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

## 1.2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi

kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan; dan
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

### **1.3. SUMBER DATA**

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2021. Susenas merupakan survei semseteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Sampel Susenas Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di 24 kabupaten/kota yang mencakup 15.298 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2021 tersusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

**BAB I. PENDAHULUAN**, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan,

Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. METODOLOGI**, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.

**BAB III. KONSEP DAN DEFINISI**, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.

**BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH**, meliputi Partisipasi Siswa pada Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

**BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN**, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.

**BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**, meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Pendidik, Jumlah Siswa, dan Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru.

**BAB VII. PENUTUP**, meliputi Kesimpulan.

## BAB II

### METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

#### 2.1. RUANG LINGKUP

Susenas Maret 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus<sup>1</sup> khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga, tersebar dalam 1.530 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN21.K dan VSEN21.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, tangga.

---

<sup>1</sup>Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa

## 2.1. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan Supas 2015 adalah sekitar 288.000 blok sensus (40 persen populasi) yang ditarik secara *probability proportional to size* (PPS)<sup>2</sup> dengan ukuran jumlah rumah tangga Sp2010 dari *master frame* blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 40 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. Sebanyak 40 persen blok sensus tersebut disebut sampling *frame* induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

## 2.2. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Sampel rumah tangga untuk estimasi.

---

<sup>2</sup>*Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besarkabupaten/kota dipilih dengan metode *two stage one phase stratified sampling* dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap 1: Memilih 40 persen blok sensus populasi secara PPS dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- Tahap 2: Memilih sejumlah  $n$  blok sensus sesuai alokasi secara *systematic*<sup>3</sup> di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

### 2.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2021. Sampel total Susenas Maret 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15.300 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

---

<sup>3</sup>*Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

## 2.1. PENGOLAHAN DATA

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antarisian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

## BAB III

### KONSEP DAN DEFINISI

Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

2. **Mengikuti pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.
3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a - z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya contoh:

huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaiknya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.

4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang **terdaftar dan aktif** mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
6. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
7. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:
  - **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang mu pengetahuan dan

teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor. (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.

- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

**9. Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara

SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).

10. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
11. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
12. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
13. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
14. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
15. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

**16. Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

<https://sulsel.bps.go.id>



## **BAB IV**

### **PARTISIPASI SEKOLAH**

#### **4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH**

semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7–12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13–15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16–18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

##### **4.1.1 PARTISIPASI SISWA PADA PAUD**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan,

akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. (Hilary Clinton, 1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia 5–6 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 22,30 persen. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa dari 100 anak usia 5–6 tahun, terdapat lebih dari 22 orang yang sudah mengikuti pendidikan formal. Ini berarti belum optimalnya program pemerintah yang menerapkan aturan bahwa batas minimum umur anak untuk mengikuti sekolah formal SD adalah 7 tahun. Berbeda halnya dengan partisipasi prasekolah untuk anak usia 0–6 tahun, yakni mencapai 23,45 persen, mengalami peningkatan dari tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup serius terhadap anak usia dini.

Dilihat dari Paritas Gender (PG) yang merupakan selisih antara penduduk laki–laki dan perempuan, terlihat bahwa nilai PG partisipasi anak usia 5–6 tahun di Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar  $-0,77$  persen. Ini menandakan persentase anak perempuan umur 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan lebih banyak dibandingkan anak laki–laki pada usia yang sama. Indikator kesenjangan lainnya adalah Indeks Paritas Gender (IPG) yang merupakan perbandingan capaian penduduk perempuan terhadap laki–laki. Pada tahun 2020, IPG Sulawesi Selatan menunjukkan nilai  $1,04$  persen yang berarti angka kesetaraan gender di Sulawesi Selatan berada sudah di atas ambang batas kesenjangan gender, yaitu persentase perempuan yang sekolah pada usia 5–6 tahun lebih banyak dibandingkan persentase laki–laki.

Tabel 4.1.1. Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Karakteristik	Partisipasi Sekolah	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	23,10	22,81
Perempuan	24,42	24,10
Tipe Daerah		
Perkotaan	22,90	22,48
Perdesaan	24,39	24,24
Total	23,74	23,45

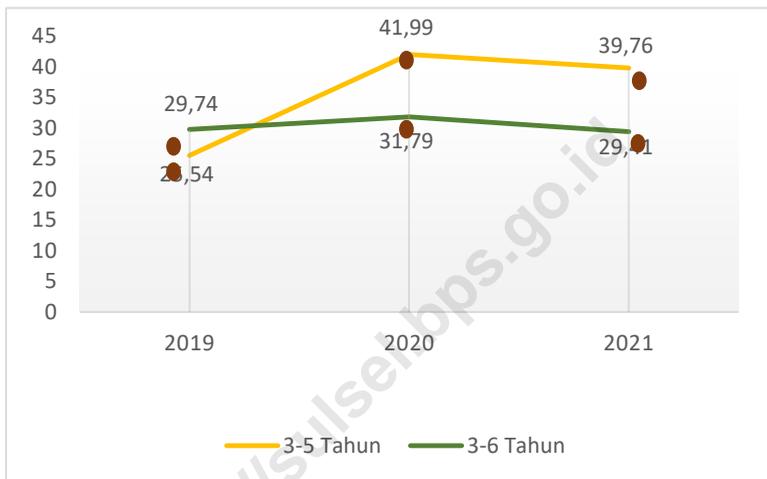
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

Tabel 4.1.2. Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang Sedang/Pernah Sekolah menurut Jenis Kelamin, Paritas Gender, dan Indeks Paritas Gender, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Tahun	Partisipasi Sekolah			Paritas Gender	Indeks Paritas Gender
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	20,84	21,61	21,23	-0,77	1,04
2021	21,18	23,43	22,30	-2,25	1,11

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

Gambar 4.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Tabel 4.1.3. Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Kabupaten	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	48,80	37,02	39,06	41,42	40,21
02. Bulukumba	23,09	26,03	26,75	23,39	25,18
03. Bantaeng	32,18	22,51	26,89	25,62	26,26
04. Jeneponto	29,48	23,05	21,68	26,97	24,31
05. Takalar	20,27	25,81	23,52	24,74	24,14
06. Gowa	26,59	14,10	16,01	24,16	20,09
07. Sinjai	40,32	37,28	42,67	33,36	38,22
08. Maros	15,36	15,60	14,74	16,26	15,50
09. Pangkep	27,61	25,42	29,39	22,27	26,00
10. Barru	33,79	36,65	29,60	42,05	35,55
11. Bone	32,46	27,03	25,48	31,50	28,49
12. Soppeng	33,08	26,45	28,60	29,15	28,86
13. Wajo	21,94	30,94	25,67	31,13	28,36
14. Sidrap	36,35	29,63	31,71	32,60	32,16
15. Pinrang	18,54	23,71	20,30	24,03	22,09
16. Enrekang	28,20	27,11	25,98	28,77	27,36
17. Luwu	23,76	21,28	22,40	21,09	21,76
18. Tana Toraja	15,36	23,32	20,74	22,65	21,68
22. Luwu Utara	13,79	22,12	21,04	20,52	20,77
25. Luwu Timur	34,96	19,14	24,52	23,03	23,81
26. Toraja Utara	15,17	20,15	24,94	12,20	18,78
71. Makassar	17,68	13,20	16,93	18,41	17,68
72. Parepare	16,28	17,95	14,75	17,90	16,29
73. Palopo	19,48	22,39	19,69	20,00	19,84
Sulawesi Selatan	22,48	24,24	22,81	24,10	23,45

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan Susenas Maret 2021

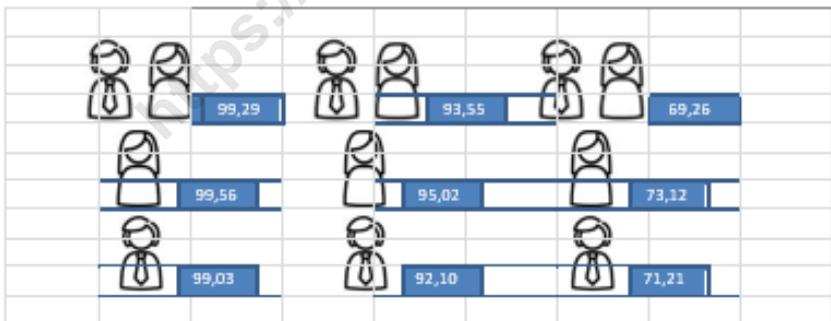
#### 4.1.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SD, SMP DAN SMA

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka

Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7–12 tahun), SMP (13–15 tahun), dan SMA (16–18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{APS SD} &= \left( \frac{\text{Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\% \\ \text{APS SMP} &= \left( \frac{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\% \\ \text{APS SMA} &= \left( \frac{\text{Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\% \end{aligned}$$

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2021 dan menggunakan formulasi diatas dapat disajikan pada **Gambar 1**. Pada **Gambar 1** terlihat bahwa APS SD sebesar 99,29 persen. Artinya, hampir

semua anak usia 7–12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada jenjang pendidikan SMP (13–15 tahun) baru mencapai 93,55 persen. Lain halnya pada jenjang pendidikan SMA (16–18 tahun), angka APS baru mencapai 69,26 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki–laki dan perempuan yang mana hal tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam hal pendidikan sudah tercapai.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, **Tabel 3** di bawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 16–18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

#### A. APS USIA 7–12 TAHUN

Secara umum, angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7–12 tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami perubahan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS SD Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 99,29 dan tahun 2020 sebesar 99,25 persen. Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, APS usia 7–12 tahun seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai lebih dari 98 persen. Tingginya angka APS di Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup berhasil.

Tabel 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Kabupaten/Kota	APS 7-12			APS 13-15		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	98.71	99.58	99.15	90.05	97.41	93.35
02. Bulukumba	98.54	98.83	98.69	95.38	90.23	92.89
03. Bantaeng	98.99	100.00	99.47	93.57	94.32	93.97
04. Jeneponto	99.94	100.00	99.97	91.50	85.44	88.39
05. Takalar	98.73	99.50	99.07	88.52	92.71	90.59
06. Gowa	98.29	99.79	98.94	93.57	98.80	96.11
07. Sinjai	100.00	99.32	99.64	88.27	97.82	92.70
08. Maros	100.00	99.51	99.76	97.24	94.41	95.92
09. Pangkep	100.00	98.04	99.00	91.79	93.16	92.47
10. Barru	99.05	99.27	99.15	91.63	97.70	94.77
11. Bone	97.30	100.00	98.56	91.77	96.46	94.11
12. Soppeng	97.69	100.00	98.86	96.48	94.37	95.43
13. Wajo	99.08	98.66	98.88	76.87	91.17	84.20
14. Sidrap	99.60	100.00	99.78	93.90	88.28	91.05
15. Pinrang	99.25	100.00	99.63	90.21	95.79	92.96
16. Enrekang	98.85	98.96	98.90	99.19	95.34	97.21
17. Luwu	97.89	100.00	98.99	94.46	90.40	92.65
18. Tana Toraja	99.44	100.00	99.71	93.86	98.14	96.04
22. Luwu Utara	99.29	100.00	99.64	89.99	96.06	92.89
25. Luwu Timur	98.79	99.48	99.16	95.74	100.00	97.61
26. Toraja Utara	99.29	98.50	98.88	95.24	98.61	96.81
71. Makassar	100.00	99.62	99.82	89.89	96.85	93.57
72. Parepare	99.84	100.00	99.92	96.16	88.80	92.94
73. Palopo	98.64	100.00	99.30	97.01	100.00	98.63
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>99.03</b>	<b>99.56</b>	<b>99.29</b>	<b>92.10</b>	<b>95.02</b>	<b>93.55</b>
<b>2020</b>	<b>99,26</b>	<b>99,24</b>	<b>99,25</b>	<b>91,95</b>	<b>94,70</b>	<b>93,34</b>

Lanjutan Tabel 3

Kabupaten/Kota	APS 16-18		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	46.31	82.50	65.48
02. Bulukumba	70.53	78.32	74.70
03. Bantaeng	51.97	61.52	56.72
04. Jeneponto	68.34	59.74	63.90
05. Takalar	53.45	77.72	65.79
06. Gowa	73.88	67.32	70.36
07. Sinjai	66.08	80.38	72.81
08. Maros	69.74	71.34	70.56
09. Pangkep	61.65	72.38	66.95
10. Barru	68.96	72.03	70.60
11. Bone	60.65	67.27	63.80
12. Soppeng	72.71	84.67	78.22
13. Wajo	56.89	72.37	64.77
14. Sidrap	64.90	73.40	69.09
15. Pinrang	67.80	79.93	73.68
16. Enrekang	77.17	82.86	79.89
17. Luwu	69.72	73.44	71.62
18. Tana Toraja	78.29	78.46	78.37
22. Luwu Utara	70.98	73.48	72.22
25. Luwu Timur	66.34	72.98	69.81
26. Toraja Utara	74.21	87.55	80.29
71. Makassar	76.49	70.36	73.38
72. Parepare	76.03	70.53	73.18
73. Palopo	76.52	92.82	84.69
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>69,26</b>	<b>73,12</b>	<b>71,21</b>
<b>2020</b>	<b>69,74</b>	<b>72,07</b>	<b>70,89</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L + P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

## B. APS USIA 7–12 TAHUN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS SMP meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APS Sulawesi Selatan tahun 2021 masih berada di angka 93,55 persen. APS Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 93,34. Pada tahun 2021 pada umumnya APS kabupaten/kota mencapai lebih dari 90 persen. Namun terdapat kabupaten yang APS-nya kurang dari 90 persen yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Wajo. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dilihat dari sisi gender, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dari sisi pendidikan hampir setara antara laki-laki maupun perempuan.

## C. APS USIA 16–18 TAHUN

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun, APS usia 16–18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS SMA Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai 71,21 persen. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini, APS yang dicapai kabupaten/kota masih berada di kisaran 56 hingga 84 persen. Kabupaten Bantaeng mempunyai angka APS SMA yang terendah yaitu 56,72 persen. Rendahnya APS usia 16–18 tahun Sulawesi Selatan mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16–18 tahun untuk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.

Seiring dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia

7–12 tahun dan 13–15 tahun, APS usia 16–18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

APS SMA Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai 71,21 persen. Meskipun perhatian pemerintah daerah sudah cukup serius pada bidang pendidikan, namun pada kelompok umur ini, APS yang dicapai kabupaten/kota masih berada di kisaran 56 hingga 84 persen.

Kabupaten Bantaeng mempunyai angka APS SMA yang terendah yaitu 56,72 persen. Rendahnya APS usia 16–18 tahun Sulawesi Selatan mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan pada tahun–tahun yang akan datang. Dilihat dari sisi gender, dari tahun ke tahun APS usia 16–18 tahun untuk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki–laki.

$$\text{APK SD} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTP} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTA} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2021 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	APK 7-12			APK 13-15		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	107.88	105.80	106.82	93.21	87.46	90.63
02. Bulukumba	112.60	112.05	112.32	89.68	89.69	89.69
03. Bantaeng	114.37	112.80	113.62	75.73	90.00	83.33
04. Jeneponto	120.83	114.30	117.67	76.91	65.37	70.99
05. Takalar	107.21	109.51	108.21	74.05	90.84	82.34
06. Gowa	104.12	110.72	107.00	80.88	87.95	84.31
07. Sinjai	110.37	106.67	108.41	73.04	87.11	79.57
08. Maros	109.68	106.56	108.16	83.77	78.33	81.23
09. Pangkep	111.76	106.16	108.91	67.97	83.78	75.77
10. Barru	101.00	102.23	101.57	82.27	95.02	88.87
11. Bone	103.12	111.00	106.80	94.51	86.65	90.58
12. Soppeng	103.64	107.65	105.68	102.42	75.39	88.91
13. Wajo	106.19	105.67	105.94	69.39	77.71	73.66
14. Sidrap	110.92	106.35	108.88	83.31	92.24	87.84
15. Pinrang	102.66	104.88	103.80	82.80	79.61	81.23
16. Enrekang	106.17	107.41	106.79	87.82	98.94	93.54
17. Luwu	104.70	102.93	103.78	81.37	76.38	79.14
18. Tana Toraja	108.56	108.51	108.54	104.65	110.40	107.58
22. Luwu Utara	101.63	108.53	105.01	82.69	82.62	82.66
25. Luwu Timur	113.94	104.63	109.02	84.59	90.54	87.20
26. Toraja Utara	111.05	109.98	110.49	86.85	95.39	90.84
71. Makassar	100.65	102.25	101.40	96.12	99.85	98.09
72. Parepare	105.91	105.90	105.90	83.47	80.98	82.38
73. Palopo	103.99	106.48	105.20	87.65	90.93	89.43
<b>Sulawesi Selatan</b>	106.47	107.26	106.85	85.37	88.29	86.82
<b>2020</b>	99.26	99.24	99.25	91.95	94.70	93.34

Lanjutan Tabel 4

Kabupaten/Kota	APK 16–18		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	57.91	92.75	76.37
02. Bulukumba	94.33	87.93	90.90
03. Bantaeng	84.59	98.09	91.31
04. Jeneponto	80.50	78.20	79.32
05. Takalar	70.48	83.53	77.12
06. Gowa	101.53	78.07	88.95
07. Sinjai	82.60	91.26	86.68
08. Maros	87.81	87.69	87.75
09. Pangkep	92.09	93.21	92.64
10. Barru	94.55	77.88	85.67
11. Bone	63.90	82.59	72.81
12. Soppeng	78.49	104.96	90.68
13. Wajo	66.60	95.89	81.50
14. Sidrap	80.28	81.09	80.68
15. Pinrang	73.24	93.71	83.16
16. Enrekang	100.41	89.90	95.38
17. Luwu	89.29	97.32	93.38
18. Tana Toraja	68.79	78.50	73.67
22. Luwu Utara	83.72	92.77	88.22
25. Luwu Timur	85.79	83.78	84.74
26. Toraja Utara	87.17	79.09	83.49
71. Makassar	101.10	83.58	92.23
72. Parepare	104.66	85.60	94.77
73. Palopo	102.98	117.45	110.23
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>87.22</b>	<b>86.94</b>	<b>87.07</b>
<b>2020</b>	<b>69.74</b>	<b>72.07</b>	<b>86,44</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L+P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Dari **Tabel 4**, terlihat bahwa APK SD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 106,47 persen, yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD, terdapat penduduk yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Kondisi ini terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 2021, APK SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Jeneponto, yaitu sebesar 117,67 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Makassar, yaitu sebesar 101,40 persen.

APK SMP mengalami kenaikan, yaitu dari 93,34 persen di tahun 2020 menjadi 86,82 persen di tahun 2021. APK tertinggi dicapai oleh Kota Makassar yaitu sebesar 98,09 persen.

Peningkatan APK SMA dari tahun 2020 dibandingkan tahun 2021, yakni dari 86,44 persen menjadi 87,07 persen. APK tertinggi dicapai oleh Kota Palopo sebesar 110,23 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Bone 72,81 persen.

Tingginya APK pada jenjang pendidikan SD menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 6 tahunnya mengingat APK tidak memperhatikan umur dalam penghitungannya.

#### 4.1. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD, SMP, DAN SMA

Selain APS dan APK diatas, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada

jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APM SD} = \left( \frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SLTP} = \left( \frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 13 - 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APM SLTA} = \left( \frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 16 - 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) Sulawesi Selatan di seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti terus bertambah. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 5. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	98.71	99.30	99.01	78.36	83.67	80.74
02. Bulukumba	98.54	98.78	98.66	86.14	80.18	83.26
03. Bantaeng	98.59	93.71	96.25	71.94	72.61	72.29
04. Jeneponto	98.94	99.97	99.44	74.30	59.34	66.63
05. Takalar	98.73	97.57	98.23	66.69	79.55	73.04
06. Gowa	98.29	96.76	97.62	73.90	80.17	76.94
07. Sinjai	99.30	99.03	99.16	70.28	79.04	74.34
08. Maros	100.00	98.74	99.38	80.99	69.32	75.54
09. Pangkep	100.00	97.87	98.92	66.55	74.67	70.55
10. Barru	98.24	98.14	98.20	74.58	89.46	82.28
11. Bone	95.73	98.45	97.00	86.42	81.55	83.99
12. Soppeng	97.69	100.00	98.86	82.10	75.28	78.69
13. Wajo	98.38	94.82	96.66	59.03	65.64	62.42
14. Sidrap	99.60	98.36	99.05	72.99	80.73	76.92
15. Pinrang	97.43	100.00	98.75	76.80	70.17	73.52
16. Enrekang	98.06	98.51	98.29	76.47	86.05	81.40
17. Luwu	97.89	98.79	98.36	79.18	68.55	74.43
18. Tana Toraja	98.80	98.03	98.43	80.79	85.90	83.40
22. Luwu Utara	98.04	100.00	99.00	73.29	70.43	71.92
25. Luwu Timur	97.88	98.63	98.28	75.95	82.46	78.81
26. Toraja Utara	99.29	98.50	98.88	80.17	87.56	83.62
71. Makassar	97.03	97.93	97.45	76.55	83.68	80.31
72. Parepare	98.55	99.20	98.88	76.33	72.86	74.82
73. Palopo	98.64	98.99	98.81	81.30	79.59	80.37
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>98.10</b>	<b>98.27</b>	<b>98.19</b>	<b>76.25</b>	<b>77.80</b>	<b>77.02</b>
<b>2020</b>	<b>98,18</b>	<b>97,77</b>	<b>97,98</b>	<b>77,25</b>	<b>75,11</b>	<b>76,17</b>

Lanjutan Tabel 5

Kabupaten/Kota	APM SMA		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	29.24	67.73	49.64
02. Bulukumba	63.43	69.10	66.47
03. Bantaeng	49.99	53.39	51.68
04. Jenepono	60.03	42.65	51.07
05. Takalar	48.29	70.78	59.72
06. Gowa	67.01	54.58	60.34
07. Sinjai	63.56	77.40	70.08
08. Maros	68.49	64.33	66.37
09. Pangkep	55.27	61.75	58.47
10. Barru	68.83	57.06	62.56
11. Bone	50.22	51.66	50.91
12. Soppeng	61.14	77.84	68.83
13. Wajo	45.68	63.60	54.80
14. Sidrap	55.24	60.81	57.98
15. Pinrang	58.32	64.63	61.38
16. Enrekang	69.87	69.94	69.90
17. Luwu	65.60	68.95	67.31
18. Tana Toraja	49.41	54.31	51.87
22. Luwu Utara	60.73	61.93	61.33
25. Luwu Timur	56.39	65.72	61.26
26. Toraja Utara	68.76	68.64	68.70
71. Makassar	69.06	51.15	60.00
72. Parepare	65.83	62.04	63.86
73. Palopo	72.97	63.26	68.11
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>61.27</b>	<b>59.45</b>	<b>60.35</b>
<b>2020</b>	<b>59,60</b>	<b>61,06</b>	<b>60,32</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L+ P = Laki-laki dan Perempuan

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

## A. APM SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2021, APM SD di Sulawesi Selatan mencapai 98,19 sedikit menurun 0,21 poin dibanding tahun 2020. Pada **Tabel 4** terlihat jelas perbedaan angka APM Sulawesi Selatan dari tahun 2021 antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7–12 tahun yang sedang duduk di SD.

## B. APM SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76,17 persen di tahun 2020 menjadi 77,02 di tahun 2021. Peningkatan APM SMP ini terjadi setengah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP tidak menunjukkan perbedaan jauh antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan sudah mulai terbuka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang dalam menuntut pendidikan. Artinya, kesempatan bersekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

## C. APM SMA

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP, pada tahun 2020 APM SMA Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2020 APM SMA mencapai 60,32 persen, meningkat menjadi 60,35 persen pada 2021. Meskipun APM SMA terendah dibandingkan APM kelompok lainnya, namun peningkatan APM SMA ini dapat menggambarkan peningkatan pencapaian program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

## BAB V

### PARTISIPASI SEKOLAH

#### 5.1. BUTA HURUF

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan
3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan

penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran (Pergub Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2019).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Dalam Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023, Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target sebesar 94,30 persen pada 2020 dan sebesar 94,94 persen pada 2021 untuk indikator TPB tersebut. Sebagai bagian dari dunia global, Sulawesi Selatan juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMK merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AMH suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

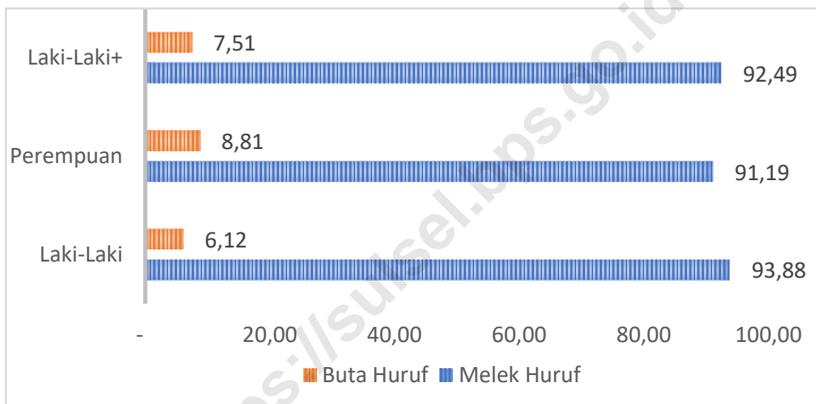
Pada 2020 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 92,56 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 2,38 persen agar target pada 2021 terpenuhi. Budaya literasi harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, paket C, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Pada 2020, terdapat sebanyak 7,44 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan yang masih buta huruf.

Pada **Gambar 2** tersaji potret kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada 2020, persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih banyak daripada persentase penduduk laki-laki yang buta huruf. Padahal, persentase penduduk laki-laki yang buta huruf mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu dan persentase penduduk perempuan yang buta huruf justru mengalami penurunan. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 8,61 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 6,17 persen. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Sulawesi Selatan.

Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta huruf harus lebih ditingkatkan.

Gambar 2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Di **Tabel 6** menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis (melek huruf atau buta huruf). Tiga kabupaten yang mempunyai persentase penduduk yang buta huruf paling besar, yakni Kabupaten Jeneponto (14,76 persen), Bantaeng (13,79 persen) dan Takalar (12,67 persen). Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk buta huruf paling rendah berturut-turut adalah Kota Makassar (1,41 persen) dan Kota Palopo (1,86 persen).

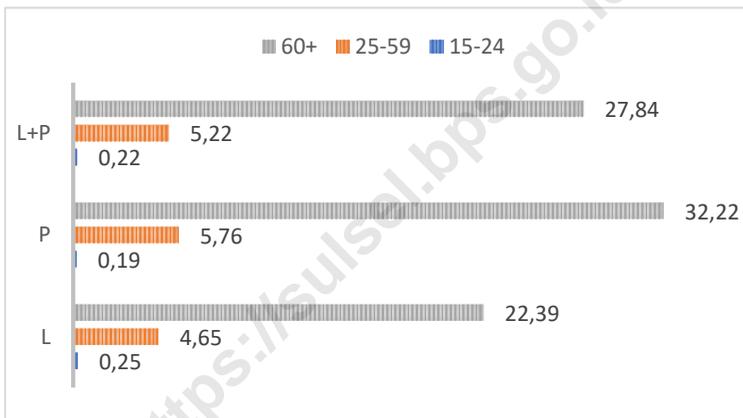
Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Melek Huruf					
	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
01. Kep. Selayar	99.30	91.62	78.36	94.39	80.74	89.12
02. Bulukumba	98.78	90.63	86.14	91.95	83.26	89.49
03. Bantaeng	93.71	84.82	71.94	87.50	72.29	82.35
04. Jeneponto	99.97	80.56	74.30	82.77	66.63	78.55
05. Takalar	97.57	88.44	66.69	91.09	73.04	86.05
06. Gowa	96.76	91.33	73.90	93.36	76.94	89.43
07. Sinjai	99.03	88.98	70.28	89.04	74.34	88.93
08. Maros	98.74	91.51	80.99	93.62	75.54	89.52
09. Pangkep	97.87	95.33	66.55	97.43	70.55	93.42
10. Barru	98.14	90.81	74.58	92.34	82.28	89.46
11. Bone	98.45	89.58	86.42	90.92	83.99	88.45
12. Soppeng	100.00	93.31	82.10	93.64	78.69	93.02
13. Wajo	94.82	89.92	59.03	91.72	62.42	88.33
14. Sidrap	98.36	93.31	72.99	94.79	76.92	91.92
15. Pinrang	100.00	92.93	76.80	94.20	73.52	91.76
16. Enrekang	98.51	92.22	76.47	94.44	81.40	90.04
17. Luwu	98.79	93.96	79.18	95.43	74.43	92.58
18. Tana Toraja	98.03	92.57	80.79	93.94	83.40	91.18
22. Luwu Utara	100.00	95.01	73.29	96.41	71.92	93.59
25. Luwu Timur	98.63	93.59	75.95	95.49	78.81	91.54
26. Toraja Utara	98.50	90.67	80.17	91.77	83.62	89.57
71. Makassar	97.93	98.23	76.55	98.32	80.31	98.15
72. Parepare	99.20	97.75	76.33	98.38	74.82	97.14
73. Palopo	98.99	97.94	81.30	99.14	80.37	96.80
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>98.27</b>	<b>92.49</b>	<b>76.25</b>	<b>93.88</b>	<b>77.02</b>	<b>91.19</b>

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis pada laki-laki hampir disemua kabupaten berada diangka 90 persen ke atas,

hanya ada 6 Kabupaten yang berada di bawah 90 persen. Sedangkan untuk perempuan hanya ada 3 kabupaten/kota yang persentase angka melek hurufnya berada di bawah angka 90 persen. Antara lain Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai.

Gambar 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf menurut kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. **Gambar 3** menyajikan angka buta huruf menurut kelompok remaja (15–24 tahun), kelompok dewasa (25–59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas) di Sulawesi Selatan tahun 2021.

**Gambar 3** menunjukkan bahwa sebaran penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf sebagian besar berada pada kelompok lansia (60 tahun ke

atas). Secara total (penduduk laki-laki dan penduduk perempuan), penduduk lansia yang buta huruf/buta aksara sebanyak 27,84 persen. Selanjutnya, penduduk dewasa yang buta aksara sebanyak 5,76 persen dan penduduk remaja yang buta aksara sebanyak 4,65 persen. Secara total, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf cenderung menurun setiap tahunnya meskipun dilihat menurut kelompok umur.

Penduduk perempuan yang buta huruf baik kelompok lansia maupun kelompok dewasa masih lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang buta huruf. Meskipun demikian, remaja perempuan yang buta huruf pada 2021 lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran remaja perempuan akan pentingnya pendidikan. Penduduk laki-laki yang buta huruf untuk semua kelompok umur mengalami kenaikan pada 2021.

Selanjutnya, pada **Tabel 7** disajikan penduduk buta huruf menurut kelompok umur yang dirinci hingga level kabupaten/kota. Jika dilihat menurut jenis kelamin dan atau secara total, persentase penduduk remaja yang buta huruf di sebagian besar kabupaten/kota sudah mencapai nol persen. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kota Pare-Pare, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Gowa karena angka buta huruf remajanya me satu persen (jika dilihat menurut jenis kelamin dan atau secara total).

Tabel 7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, Provinsi Sulawesi Selatan 2021.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan		
	15-24	25-59	60+	15-24	25-59	60+
1	2	3	4	5	6	7
01. Kep. Selayar	2.72	43.55	53.72	-	47.29	52.71
02. Bulukumba	-	51.17	48.83	1.18	49.86	48.96
03. Bantaeng	1.02	58.03	40.95	-	56.89	43.11
04. Jeneponto	0.61	62.73	36.65	-	55.87	44.13
05. Takalar	-	51.17	48.83	1.47	44.88	53.66
06. Gowa	4.20	50.29	45.51	-	49.45	50.55
07. Sinjai	-	45.40	54.60	-	41.94	58.06
08. Maros	1.11	50.99	47.90	-	37.89	62.11
09. Pangkep	-	42.79	57.21	-	29.99	70.01
10. Barru	-	42.20	57.80	1.60	32.20	66.20
11. Bone	1.45	36.47	62.09	-	33.16	66.84
12. Soppeng	-	38.28	61.72	-	10.09	89.91
13. Wajo	-	47.04	52.96	-	37.44	62.56
14. Sidrap	-	44.69	55.31	-	25.79	74.21
15. Pinrang	2.22	55.46	42.32	-	28.29	71.71
16. Enrekang	-	29.96	70.04	0.66	27.42	71.92
17. Luwu	-	63.73	36.27	-	38.48	61.52
18. Tana Toraja	1.07	59.20	39.73	5.36	31.83	62.80
22. Luwu Utara	-	49.13	50.87	-	37.12	62.88
25. Luwu Timur	-	43.37	56.63	-	46.33	53.67
26. Toraja Utara	0.57	39.66	59.77	2.23	40.92	56.85
71. Makassar	-	48.75	51.25	-	55.94	44.06
72. Pare Pare	-	24.47	75.53	8.24	38.51	53.24
73. Palopo	-	24.67	75.33	-	24.98	75.02
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0.91</b>	<b>48.72</b>	<b>50.38</b>	<b>0.44</b>	<b>41.27</b>	<b>58.29</b>

Lanjutan Tabel 7

Kabupaten/Kota	Laki-Laki + Perempuan		
	15-24	25-59	60+
1	2	3	4
01. Kep. Selayar	0.87	46.10	53.03
02. Bulukumba	0.71	50.38	48.91
03. Bantaeng	0.40	57.34	42.26
04. Jeneponto	0.26	58.76	40.98
05. Takalar	0.93	47.18	51.89
06. Gowa	1.56	49.76	48.68
07. Sinjai	-	43.58	56.42
08. Maros	0.41	42.67	56.93
09. Pangkep	-	33.35	66.65
10. Barru	0.97	36.10	62.92
11. Bone	0.58	34.49	64.93
12. Soppeng	-	22.47	77.53
13. Wajo	-	41.15	58.85
14. Sidrap	-	32.88	67.12
15. Pinrang	0.87	38.99	60.13
16. Enrekang	0.42	28.32	71.25
17. Luwu	-	47.74	52.26
18. Tana Toraja	3.60	43.10	53.30
22. Luwu Utara	-	41.48	58.52
25. Luwu Timur	-	45.25	54.75
26. Toraja Utara	1.49	40.36	58.14
71. Makassar	-	52.61	47.39
72. Pare Pare	5.34	33.56	61.10
73. Palopo	-	24.92	75.08
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0.62</b>	<b>44.19</b>	<b>55.19</b>

## 5.1. PENDUDUK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar

1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu, dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Harapannya tidak ada anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah.

Tabel 8 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.46	0.36	0.41
2. Masih sekolah	89.87	91.49	90.66
3. Tidak bersekolah lagi	9.67	8.15	8.92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Dari **Tabel 8** terlihat pada 2020 anak usia 7–18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah sudah mencapai 90,66 persen. Hal tersebut berarti sekitar 9 persen sisanya sedang tidak duduk di bangku sekolah. Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebanyak 0,41 persen anak usia 7–18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan terdapat sebanyak 8,92 persen anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah lagi (anak tidak sekolah/ATS). Seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020–2024, ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum.

anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pada 2021, anak perempuan usia 7–18 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dari anak laki-laki, yakni mencapai 91,49 persen. Hal itu berarti, pada 2021, ATS laki-laki lebih tinggi dari ATS perempuan, yakni hampir mencapai angka 8 persen.

**Tabel 9** menyajikan gambaran partisipasi sekolah penduduk 7–18 tahun yang dirinci menurut klasifikasi daerah. Secara total (laki-laki dan perempuan), persentase anak usia 7–18 tahun di perdesaan yang tidak sekolah lebih tinggi dibandingkan anak usia 7–18 tahun di perkotaan, yakni berturut-turut sebesar 9,84 persen dan 7,82 persen. Hal tersebut menunjukkan masih ada ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Di daerah perdesaan, persentase anak laki-laki usia 7–18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi jika dibandingkan anak perempuan, yakni berturut-turut sebesar 10,98 persen dan 8,67 persen. Selisih persentase keduanya sudah melebihi 2 persen sehingga perlu dijadikan perhatian. Sebaliknya, di perkotaan, persentase anak perempuan usia 7–18 tahun yang tidak sekolah lebih tinggi dari anak laki-laki meskipun ketimpangannya tidak signifikan seperti di perdesaan.

Tabel 9 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, Klasifikasi Daerah, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2021

Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.25	0.17	0.21	0.63	0.51	0.57
2. Masih sekolah	90.87	92.06	91.45	89.05	91.03	90.03
3. Tidak bersekolah lagi	8.88	7.77	8.34	10.31	8.46	9.39
<b>4. Jumlah 1 dan 3</b>	9.13	7.94	8.55	10.95	8.97	9.97

Lanjutan Tabel 9

Partisipasi Sekolah	Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L + P
(1)	(8)	(9)	(10)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0.46	0.36	0.41
2. Masih sekolah	89.87	91.49	90.66
3. Tidak bersekolah lagi	9.67	8.15	8.92
<b>4. Jumlah 1 dan 3</b>	<b>10.13</b>	<b>8.51</b>	<b>9.34</b>

Catatan: L = Laki-laki

P = Perempuan

L+ P = Laki-laki dan Perempuan

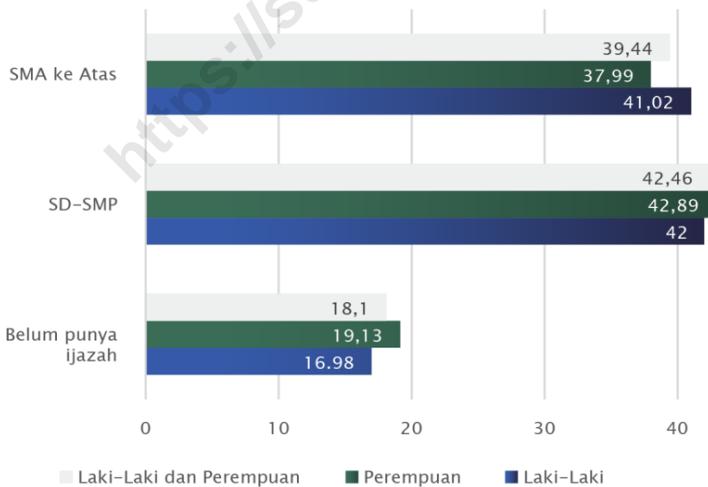
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

### 5.1. PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu termasuk Program KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah turut melakukan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah salah satunya dengan menerapkan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selanjutnya, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, pemerintah melakukan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan turut perlu ditingkatkan. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024).

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan sumber daya manusia. **Gambar 4** menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan. Pada 2020, sebagian besar (42,46 persen) penduduk Sulawesi Selatan usia 15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan dasar, yakni setingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Meskipun demikian, masih ada 18,1 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah pada 2020. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan kondisi 2019.

Gambar 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Jika ditinjau dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan dasar tidak terlalu timpang. Namun demikian, persentase penduduk laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan menengah dan tinggi masih lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Selanjutnya, persentase penduduk perempuan yang belum memiliki ijazah pun masih lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, yakni sebanyak 19,13 persen. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Harapannya, pada 2025 kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk pendidikan.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### 6.1. JUMLAH SEKOLAH

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. **Tabel 10** menyajikan jumlah sekolah menurut status sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2020/2021. Terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang SD/MI sebanyak 6426 sekolah, jenjang SMP/Mts sebanyak 1709 sekolah, setingkat SMA/MA sebanyak 601 sekolah, jenjang SMK sebanyak 422 sekolah, dan SLB sebanyak 92 sekolah.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara pendidikan jenjang SMK di Sulawesi Selatan didominasi oleh pihak swasta dibanding negeri/pemerintah. Persentase SMK negeri dan SMK swasta pun cukup jauh perbedaannya, yakni 40,04 persen berbanding 59,95 persen. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), persentase jumlah sekolah setingkat SMA/MA dan setingkat SMK tidak terlalu berbeda jauh, yakni 58,75 persen (601 sekolah) berbanding 41,25 persen (422 sekolah). Jumlah sekolah setingkat SMK yang cukup bersaing dengan SMA diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan sebagai sarana tercipta sumber daya manusia yang siap bekerja secara profesional di bidangnya. Harapannya terjadi kemajuan maksimal antara laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Tabel 10 Jumlah Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Status Sekolah, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Kep. Selayar	139	2	141	49	4	53	9	2	11
02. Bulukumba	348	2	350	63	6	69	19	2	21
03. Bantaeng	147	3	150	25	17	42	6	1	7
04. Jeneponto	285	3	288	64	12	76	14	10	24
05. Takalar	234	5	239	37	8	45	13	12	25
06. Gowa	400	20	420	83	36	119	22	28	50
07. Sinjai	239	5	244	40	3	43	14	2	16
08. Maros	223	16	239	43	32	75	14	20	34
09. Pangkep	300	4	304	78	14	92	24	9	33
10. Barru	197	2	199	35	5	40	6	2	8
11. Bone	665	10	675	114	9	123	30	7	37
12. Soppeng	250	4	254	31	7	38	8	4	12
13. Wajo	378	14	392	70	4	74	15	5	20
14. Sidrap	229	8	237	44	5	49	11	5	16
15. Pinrang	315	12	327	52	6	58	11	4	15
16. Enrekang	219	3	222	40	6	46	12	5	17
17. Luwu	263	13	276	80	26	106	19	6	25
18. Tana Toraja	210	10	220	63	19	82	13	5	18
22. Luwu Utara	242	5	247	73	2	75	19	0	19
25. Luwu Timur	155	13	168	36	13	49	13	6	19
26. Toraja Utara	184	8	192	65	12	77	9	6	15
71. Makassar	314	156	470	56	174	230	24	112	136
72. Parepare	80	12	92	13	10	23	5	5	10
73. Palopo	65	15	80	14	11	25	6	7	13
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>6 081</b>	<b>345</b>	<b>6 426</b>	<b>1 268</b>	<b>441</b>	<b>1 709</b>	<b>336</b>	<b>265</b>	<b>601</b>

Lanjutan Tabel 10

Kabupaten/Kota	SMK			SLB		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
01. Kep. Selayar	8	0	8	1	0	1
02. Bulukumba	11	5	16	1	1	2
03. Bantaeng	5	7	12	1	1	2
04. Jenepono	10	11	21	2	2	4
05. Takalar	7	2	9	2	7	9
06. Gowa	5	16	21	1	5	6
07. Sinjai	4	6	10	1	1	2
08. Maros	2	15	17	1	3	4
09. Pangkep	9	5	14	1	1	2
10. Barru	5	1	6	1	0	1
11. Bone	10	13	23	1	8	9
12. Soppeng	5	5	10	1	5	6
13. Wajo	9	5	14	1	1	2
14. Sidrap	8	4	12	1	0	1
15. Pinrang	10	7	17	1	0	1
16. Enrekang	6	4	10	1	0	1
17. Luwu	13	12	25	0	3	3
18. Tana Toraja	4	23	27	1	2	3
22. Luwu Utara	8	6	14	0	3	3
25. Luwu Timur	2	2	4	0	3	3
26. Toraja Utara	5	17	22	0	1	1
71. Makassar	13	68	81	2	20	22
72. Parepare	3	9	12	1	1	2
73. Palopo	7	10	17	1	1	2
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>169</b>	<b>253</b>	<b>422</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>92</b>

Catatan: N = Negeri

S = Swasta

J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

## 6.2 JUMLAH GURU

**Tabel 11** menyajikan jumlah pendidik/guru menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2020/2021. Jumlah guru sebanding dengan jumlah sekolah. Tingginya jumlah sekolah memengaruhi jumlah tenaga pendidik di dalamnya. Jumlah guru SD/MI terbanyak berada di Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa sesuai dengan jumlah sekolah jenjang SD/MI yang dimiliki. Namun demikian, Kabupaten Bone memiliki jumlah SD terbanyak tetapi jumlah gurunya masih jauh di bawah Kota Makassar, yakni 5.112 orang dibanding 63.413 orang. Selanjutnya, jumlah guru SMP/MTs di Sulawesi Selatan sebanyak 28.713 orang. Kota Makassar memiliki jumlah guru SMP/MTs tertinggi, yakni sebanyak 3.730 orang.

Pada tahun ajaran 2020/2021, terdapat sebanyak 15.276 guru SMA/MA dan 10.031 guru SMK. Wilayah yang memiliki jumlah guru sekolah jenjang menengah tertinggi adalah Kota Makassar dengan 2.412 guru SMA/MA dan 1.582 guru SMK. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah jenjang menengah di Kota Makassar.

Jika dilihat menurut jenis kelamin untuk semua status sekolah, jumlah guru perempuan selalu lebih tinggi dibanding jumlah guru laki-laki. Guru SD/MI perempuan di Sulawesi Selatan jumlahnya mencapai tiga kali lipat jumlah guru SD/MI laki-laki, yakni 48.538 orang dibanding 14.875 orang. Selanjutnya, jenjang pendidikan dengan selisih guru perempuan dan laki-laki terendah adalah jenjang SMK. Terdapat 61,45 persen guru SMK perempuan (6.164 orang) dan 38,55 persen guru SMK laki-laki (3.867 orang).

Tabel 11 Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Kabupaten/Kota	Total	SD/MI			SMP/MTs		
		L	P	J	L	P	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Makassar	15 347	1 613	5 558	7 171	1 139	2 591	3 730
Kab. Bone	8 948	1 132	4 064	5 196	606	1 345	1 951
Kab. Gowa	7 905	933	3 282	4 215	585	1 376	1 961
Kab. Bulukumba	5 522	742	2 319	3 061	397	876	1 273
Kab. Pangkajene Kepulauan	5 333	704	2 049	2 753	459	1 028	1 487
Kab. Luwu	5 494	483	2 226	2 709	438	1 071	1 509
Kab. Pinrang	2 656	636	2 254	2 890	408	900	1 308
Kab. Wajo	3 912	705	2 281	2 986	313	717	1 03
Kab. Jeneponto	5 051	789	2 058	2 847	385	786	1 171
Kab. Takalar	4 459	517	1 852	2 369	279	768	1 047
Kab. Maros	4 367	554	1 772	2 326	323	728	1 051
Kab. Luwu Utara	4 443	614	1 693	2 307	350	779	1 129
Kab. Sinjai	4 065	612	1 74	2 352	307	608	915
Kab. Enrekang	3 977	595	1 654	2 249	326	573	899
Kab. Toraja Utara	4 199	509	1 488	1 997	428	821	1 249
Kab. Tana Toraja	4 038	551	1 436	1 987	391	657	1 048
Kab. Soppeng	3 869	531	1 844	2 375	220	529	749
Kab. Sidenreng Rappang	3 649	454	1 555	2 009	318	568	886
Kab. Luwu Timur	3 526	417	1 509	1 926	353	583	936
Kab. Bantaeng	3 406	534	1 56	2 094	221	481	702
Kab. Barru	3 074	457	1 392	1 849	232	483	715
Kab. Kepulauan Selayar	3 037	403	1 206	1 609	253	584	837
Kota Palopo	2 556	156	890	1 046	173	459	632
Kota Parepare	1 249	234	856	1 090	154	362	516
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>117 565</b>	<b>14 875</b>	<b>48 538</b>	<b>63 413</b>	<b>9 058</b>	<b>19 673</b>	<b>28 731</b>

Lanjutan Tabel 11

Kabupaten/Kota	SMA/MA			SMK			SLB		
	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kota Makassar	876	1 536	2 412	685	985	1 670	98	266	364
Kab. Bone	416	789	1 205	188	333	521	14	61	75
Kab. Gowa	352	714	1 066	206	369	575	24	64	88
Kab. Bulukumba	269	475	744	148	240	388	11	45	56
Kab. Pangkajene Kepulauan	244	400	644	128	278	406	9	34	43
Kab. Luwu	226	511	737	159	344	503	2	34	36
Kab. Pinrang	181	305	486	226	333	559	5	9	14
Kab. Wajo	193	317	510	113	174	287	3	23	26
Kab. Jenepono	207	369	576	158	249	407	16	34	50
Kab. Takalar	199	454	653	114	212	326	17	47	64
Kab. Maros	261	431	692	95	180	275	6	17	23
Kab. Luwu Utara	227	421	648	119	224	343	4	12	16
Kab. Sinjai	185	374	559	63	144	207	9	23	32
Kab. Enrekang	205	337	542	108	169	277	4	6	10
Kab. Toraja Utara	180	279	459	239	249	488	0	6	6
Kab. Tana Toraja	170	327	497	208	268	476	4	26	30
Kab. Soppeng	131	213	344	122	221	343	14	44	58
Kab. Sidenreng Rappang	182	240	422	127	186	313	5	14	19
Kab. Luwu Timur	194	344	538	41	70	111	2	13	15
Kab. Bantaeng	117	167	284	100	202	302	4	20	24
Kab. Barru	103	163	266	85	136	221	3	20	23
Kab. Kepulauan Selayar	108	209	317	84	170	254	3	17	20
Kota Palopo	170	239	409	197	241	438	7	24	31
Kota Parepare	104	162	266	154	187	341	6	11	17
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>5 5</b>	<b>9 776</b>	<b>15 276</b>	<b>3 867</b>	<b>6 164</b>	<b>10 031</b>	<b>270</b>	<b>870</b>	<b>1 14</b>

Catatan: L = Laki-Laki

P = Perempuan

J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

## 6.1. JUMLAH MURID

Tabel 12 menyajikan jumlah murid/siswa menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2020/2021. Secara total, terdapat 1.614.540 murid yang bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) di Sulawesi Selatan pada tahun ajaran 2020/2021. Jika dibandingkan, 51,41 persen dari total murid merupakan murid laki-laki dan 48,59 persen sisanya merupakan murid perempuan. Selisih persentase di antara keduanya dapat dibilang rendah, yakni sekitar 2,82 persen. Namun demikian, jika dilihat secara jumlah, selisih di antara keduanya sebanyak 53.187 murid. Artinya, murid laki-laki lebih banyak 53.187 orang dibanding murid perempuan. Kabupaten/kota yang memiliki murid bersekolah di jenjang SD sampai SMK (termasuk SLB) tertinggi adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone. Hal tersebut sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di 3 kabupaten/kota tersebut (jumlahnya terbanyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan).

Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), jumlah murid laki lebih banyak dibanding murid perempuan. Hal tersebut berkebalikan dengan komposisi murid pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK). Jumlah murid laki-laki yang duduk di bangku sekolah menengah sebanyak 101.786 orang. Sedangkan terdapat 124.893 murid perempuan yang duduk di bangku sekolah menengah. Jika dirinci lebih dalam, baik jumlah murid laki-laki maupun jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA/MA lebih banyak daripada yang duduk di bangku SMK. Selanjutnya, murid perempuan di SMA/MA lebih tinggi jika dibandingkan dengan murid laki-laki, yakni sebesar 52.257 orang dan 76.688 orang. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih berminat untuk sekolah di jenjang SMK daripada penduduk perempuan.

Tabel 12.1. Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Kabupaten/Kota	SD/MI		J	SMP/MTs		
	L	P		L	P	J
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Makassar	68 391	63 94	132 331	31 136	30 324	61 46
Kab Bone	37 92	35 198	73 118	14 331	14 152	28 483
Kab Gowa	35 732	33 548	69 28	11 656	11 88	23 536
Kab Bulukumba	22 25	20 677	42 927	6 682	6 92	13 602
Kab Pangkajene Kepulauan	21 345	19 85	41 195	6 764	7 052	13 816
Kab Luwu	19 201	17 604	36 805	7 898	7 212	15 11
Kab Pinrang	21 583	19 733	41 316	7 557	7 871	15 428
Kab Wajo	19 15	17 804	36 954	7 34	7 486	14 826
Kab Jeneponto	20 126	18 837	38 963	6 429	6 472	12 901
Kab Takalar	16 327	15 256	31 583	6 734	6 399	13 133
Kab Maros	18 539	17 342	35 881	5 301	5 538	10 839
Kab Luwu Utara	15 865	14 166	30 031	8 196	7 542	15 738
Kab Sinjai	15 993	14 719	30 712	6 301	6 016	12 317
Kab Enrekang	15 071	13 938	29 009	6 179	6 04	12 219
Kab Toraja Utara	14 527	12 769	27 296	7 545	6 701	14 246
Kab Tana Toraja	15 818	15 14	30 958	4 896	4 816	9 712
Kab Soppeng	12 891	11 601	24 492	4 827	4 67	9 497
Kab Sidenreng Rappang	11 792	10 765	22 557	4 525	3 967	8 492
Kab Luwu Timur	9 845	9 321	19 166	2 963	3 231	6 194
Kab Bantaeng	8 825	8 256	17 081	3 478	3 495	6 973
Kab Barru	10 04	9 384	19 424	3 354	3 516	6 87
Kab Kepulauan Selayar	8 793	8 164	16 957	4 196	4 32	8 516
Kota Palopo	7 189	6 447	13 636	3 034	3 213	6 247
Kota Parepare	7 641	7 131	14 772	3 058	3 147	6 205
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>454 854</b>	<b>421 59</b>	<b>876 444</b>	<b>174 38</b>	<b>171 98</b>	<b>346 36</b>

Tabel 12.2 Jumlah Murid menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Kabupaten/Kota	SMA/MA			SMK			SLB		
	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kota Makassar	18 598	20 415	39 013	13 963	11 806	25 769	875	540	1 415
Kab Bone	7 529	8 718	16 247	5 816	4 354	10 17	247	178	425
Kab Gowa	8 636	10 047	18 683	3 216	2 448	5 664	191	110	301
Kab Bulukumba	4 738	5 901	10 639	1 984	1 641	3 625	90	60	150
Kab Pangkajene Kepulauan	3 178	4 358	7 536	4 165	3 164	7 329	23	17	40
Kab Luwu	5 391	6 32	11 711	3 902	2 043	5 945	84	87	171
Kab Pinrang	4 803	5 476	10 279	1 942	1 23	3 172	103	52	155
Kab Wajo	3 607	4 48	8 087	3 256	2 087	5 343	103	49	152
Kab Jeneponto	3 794	4 299	8 093	2 429	2 369	4 798	88	52	140
Kab Takalar	4 317	5 088	9 405	2 558	1 745	4 303	126	89	215
Kab Maros	3 379	3 947	7 326	1 726	1 16	2 886	69	42	111
Kab Luwu Utara	2 638	5 06	7 698	5 599	2 506	8 105	25	20	45
Kab Sinjai	4 744	5 395	10 139	1 205	740	1 945	63	40	103
Kab Enrekang	3 964	4 823	8 787	2 632	1 621	4 253	67	46	113
Kab Toraja Utara	2 72	5 22	7 94	5 462	1 939	7 401	84	72	156
Kab Tana Toraja	2 41	3 317	5 727	1 828	1 407	3 235	25	30	55
Kab Soppeng	3 339	3 765	7 104	852	874	1 726	65	43	108
Kab Sidenreng Rappang	3 319	4 091	7 41	2 067	1 112	3 179	19	19	38
Kab Luwu Timur	1 619	1 894	3 513	1 405	1 421	2 826	54	26	80
Kab Bantaeng	1 625	2 048	3 673	1 731	1 11	2 841	44	16	60
Kab Barru	1 754	2 449	4 203	2 117	1 4	3 517	123	82	205
Kab Kepulauan Selayar	2 279	3 519	5 798	3 295	1 524	4 819	92	61	153
Kota Palopo	1 77	2 004	3 774	1 047	987	2 034	33	23	56
Kota Parepare	1 635	2 259	3 894	2 491	1 569	4 06	66	35	101
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>101 786</b>	<b>124 893</b>	<b>226 679</b>	<b>76 688</b>	<b>52 257</b>	<b>128 945</b>	<b>2 759</b>	<b>1 789</b>	<b>4 548</b>

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

## 6.4 RASIO MURID TERHADAP ROMBONGAN BELAJAR DAN GURU

Jumlah rombongan belajar (rombel) dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh setiap guru pada satuan pendidikan tersebut. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa pada jenjang SD, satu rombel layaknya mencakup 20–28 peserta didik (murid). Sementara itu, pada jenjang SMP setidaknya terdiri dari 20–32 murid dalam satu rombel. Selanjutnya, jenjang SMA mencakup 20–36 murid dalam satu rombel dan sebanyak 15–36 murid yang dicakup dalam satu rombel untuk jenjang SMK.

Tabel 13 Jumlah dan Rasio Murid dan Rombongan Belajar menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Murid per Rombel
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	876 444	45 925	19
SMP/MTs	34 636	13 070	3
SMA/MA	226 679	7 600	30
SMK	128 945	5 388	24

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam **Tabel 13**, terlihat bahwa sebagian besar jenjang pendidikan di Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tersebut. Jenjang pendidikan tersebut adalah

SMP, SMA, dan SMK Namun demikian, rasio murid per rombel untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada Harapannya, murid SD akan semakin bertambah mengingat ketersediaan rombel setingkat SD di Sulawesi Selatan cukup banyak.

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sektor pendidikan Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru Angka tersebut menggambarkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru Semakin tinggi nilai rasio tersebut di suatu sekolah, semakin berkurang efektivitas proses belajar mengajar Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang sehingga kualitas pengajaran akan semakin rendah.

Tabel 14 Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid per Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	876 444	63 413	14
SMP/MTs	34 636	28 731	1
SMA/MA	226 679	15 276	15
SMK	128 945	10 031	13

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (diolah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid **Tabel 14** menyajikan data rasio murid-guru Dari tabel tersebut terlihat rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Sulawesi Selatan cukup jauh berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMK meskipun

selisih rasio murid-guru dengan nilai ideal yang ditetapkan tidak terlalu tinggi

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7 1 KESIMPULAN

Dari hasil kajian data Susenas 2021 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (5–6 tahun) pada 2021 di Sulawesi Selatan baru mencapai 22,30 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Provinsi Sulawesi Selatan, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan
3. Hingga tahun 2021 masih terdapat 8,81 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/ tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Sulawesi Selatan. Jika dirinci menurut kelompok umur, masih terdapat 5,22 persen penduduk usia 25–29 tahun dan 0,22 persen penduduk usia 15–24 tahun yang buta huruf
4. Di Sulawesi Selatan, terdapat 0,41 persen anak usia 7–18 tahun yang

tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, persentase anak usia 7–18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

5. Pada 2020, masih terdapat 18,1 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah di Sulawesi Selatan. Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah lebih tinggi dibanding laki–laki usia 15 tahun ke atas yang belum punya ijazah.
6. Jumlah guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2020/2021 didominasi oleh perempuan. Jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sebanding dengan jumlah sekolah pada jenjang tersebut.
7. Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Sulawesi Selatan, jumlah murid perempuan yang duduk di bangku SMA/MA lebih tinggi dibandingkan jumlah murid laki–laki pada jenjang yang sama.
8. Jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2020/2021 sudah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Namun demikian, rasio murid per rombel untuk jenjang SD masih di bawah ketentuan yang ada.
9. Rasio murid–guru di Sulawesi Selatan pada Tahun Ajaran 2020/2021 masih berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISIK**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No 6 Makassar 90125  
Telp: (0411) 854838, Fax: (0411) 851225  
Homepage: <https://www.sulsel.bps.go.id>  
Email: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)